

Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian - Perubahan

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan STRTTK yang Dilegalisir Basah	Wajib
2	Scan Surat pernyataan Apoteker atau Pimpinan Tempat Pemohon Melaksanakan Kefarmasian (Pakai Kop, Cap, dan Materai Rp 6.000)	Wajib
3	Scan SIP Apoteker Penanggung jawab	Wajib
4	Scan Surat Persetujuan Pimpinan (Untuk Pengajuan Rekom 2 atau 3)	Wajib
5	Scan Surat izin sarana fasyankes atau Scan izin lokasi, Izin operasional, dan NIB dari OSS (PTSP) bagi izin sarana fasyankes yang sedang diproses)	Wajib
6	Scan SIPTTK Kesatu atau Kedua (untuk Pengajuan SIPTTK Kedua dan Ketiga)	Wajib
7	Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Materai)	Wajib
8	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem OSS	Wajib
9	Scan Izin Lokasi Yang Dikeluarkan Oleh OSS	Wajib
10	Scan KTP Pemohon	Wajib
11	Scan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisasi	Wajib
12	Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik	Wajib
13	Scan Surat persetujuan Atasan Langsung (Pakai Kop dan Cap)	Wajib
14	Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4x6 cm Sebanyak 1 (satu) Lembar Berlatar Merah	Wajib
15	Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi	Wajib
16	Scan Izin Asli (Jika Perubahan)	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Registrasi, Izin Praktik dan Kerja Tenaga Kefarmasian
2	Surat Edaran Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin, Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
3	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
5	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
6	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7	Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
8	Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
9	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10	Keputusan Walikota Batam Nomotr : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
----	---

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 0,00